

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PAGEDONGAN
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	59
BAB V PENUTUP	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi

- Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 4 Program, 8 kegiatan, dan 22 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.029.662.400,-, dengan fokus utama pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. Kecamatan memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Keterbatasan/ Kurangnya jumlah personil Kecamatan Pagedongan
2. Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian kepada masyarakat
3. Masih kurangnya koordinasi antar seksi
4. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah Kecamatan.
5. Masih kurangnya/rendahnya kesadaran aparatur pemerintahan Desa dalam mengerjakan buku administrasi desa.

Dari 4 program, 8 kegiatan, dan 22 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk

dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 4 program, 8 kegiatan, dan 22 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1.922.826.738,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan dengan berkurangnya Anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN itu pengurangan yang terbanyak. Perubahan tersebut tidak mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah yaitu tetap 4 program, 8 kegiatan, dan 22 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.845.996.738,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022,

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik , dengan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Non Perijinan dengan indicator sub kegiatan Jumlah Pelayanan KTP, Pelayanan KK dan Pelayanan lainnya sesuai ketentuan dengan capaian melebihi target , Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan dengan indicator Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan ke Wajib Pajak itu jg melebihi target. Faktor factor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah :

1. Adanya perencanaan, pelaksanaan, monitoring yang baik
2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akandikerjakan
3. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya
4. Menyelaraskan hal hal yang akan dikerjakan seuai dengan target kinerja
5. Mengerjakan dan melakukan kegiatan sesuai dengan rencana kerja

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka perlu adanya perencanaan pelaksanaan dan evaluasi dan monev yang baik. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Semua Program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, akan tetapi masih banyak yang harus di perhatikan dan di tingkatkan kinerjanya agar sesuai dengan harapan kita indikator kinerjanya

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	7 dokumen	14 dokumen	100%	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	14 orang	100%	15 orang	100%	15 orang	15 orang	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa adm. keuangan yang terbayarkan	6 orang	6 orang	100%	6 orang	100%	6 orang	6 orang	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terpenuhi	1 paket	1 paket		1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang terpenuhi	8 paket	8 paket		8 paket	100%	8 paket	8 paket	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	100%	-	100%	-	-	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 paket		-	100%	-	-	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa listrik yang tersedia	1 tahun	1 tahun		1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang terbayarkan	1 tahun	1 tahun		1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan, perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	8 unit	7 unit		8 unit	100%	8 unit	8 unit	100%

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan rumah dinas yang terpelihara	2 unit	2 unit		2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	20 unit	20 unit		20 unit	100%	20 unit	20 unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	-	-		-	-	-	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	-	-		-	-	-	-	-
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	-		-	-	-	-	-
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	-		-	-	-	-	-

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah perdes dan perkades yang disusun	9 desa	9 desa	100%	9 desa	100%	9 desa	9 desa	100%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan administrasi desa	9 dokumen	9 desa	100%	9 desa	100%	9 desa	9 desa	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa	7 desa	7 desa	100%	7 desa	100%	7 desa	7 desa	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah fasilitasi perencanaan pembangunan desa	9 desa	9 desa	100%	9 desa	100%	9 desa	9 desa	100%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi kegiatan Trantibum	9 desa	9 desa	100%	9 desa	100%	9 desa	9 desa	100%

	FasilitasiPenyusunan Program danPelaksanaanPemberdaya anMasyarakat Desa	Jumlah fasilitasipenyusunan program dan pelaksanaanpemberdaya an masyarakat desa	7 desa	7 desa	100%	7 desa	100%	7 desa	7 desa	100%
	KoordinasiPendampinganDes a diWilayahnya	Jumlah fasilitasikoordinasipenda mpingan desa	7 desa	7 desa	100%	7 desa	100%	7 desa	7 desa	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 2 Indikator. Yaitu Nilai SAKIP dan Nilai IKM. Dari 2 indikator tersebut 2 berstatus tercapai dan 0 indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Merencanakan target kinerja
2. Menyelaraskan hal-hal yang dikerjakan dengan target kinerja
3. Peningkatan kinerja aparatur dalam menjalankan tugas
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas
5. Melaporkan Capaian Kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.
6. Melakukan perbaikan dokumen yang belum sesuai
7. Meningkatkan pembinaan aparatur desa tentang tugas pokok dan fungsi

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Diadakannya bintek tentang pengelola keuangan di kecamatan dan di desa
2. Untuk ditambah personil di kecamatan
3. Melakukan koordinasi internal di tingkat OPD

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai SAKIP Kecamatan		√	CC	BB	BB	BB	CC	BB	BB	BB	
2	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan		√	84,30	84,35	84,35	84,40	84,69	87,14	85	85,25	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam urusan Kewilayahan , yaitu Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Masih rendahnya kesadaran aparaturnya pemerintah Desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai Juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (Penggulangan Kemiskinan, Kesehatan, dan rendahnya kesadaran Aparatur Pemerintah Desa dalam menumbuhkan kembangkan Linmas).
2. Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah Kecamatan.
3. Kondisi geografis kecamatan Pagedongan yang rawan longsor dan banyak desa yang kekurangan air bersih pas musim kering
4. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan di desa masing-masing

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban.
2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan
3. Kurangnya bintek kepada perangkat desa tentang penatausahaan keuangan desa
4. Kurangnya air bersih untuk desa desa yang kekeringan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan

produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
2. Masih kurangnya jumlah Aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat
3. Masih kurangnya dukungan anggaran serta sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah Kecamatan.
4. Peningkatan peran dan fasilitasi kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pencapaian standar pelayanan minimal.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2023. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Adanya Refocusing Anggaran

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun terakhir RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi Urusan Kewilayahan, yang terdiri dari 4 (empat) program :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota** mempunyai 6 (enam) Kegiatan yaitu :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mempunyai 3 (tiga) sub Kegiatan yaitu:
- i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - ii. Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - iii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mempunyai 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
- i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ii. Bahan Logistik Kantor
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
- i. Pengadaan Mebelair
 - ii. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
- i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, Listrik.
 - ii. Penyedia Jasa Pelayanan umum Kantor
- f. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
- i. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - iii. Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya.

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** dengan 2 Kegiatan antara lain :

- a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - i. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan 2 (dua) sub Kegiatan antara lain:
 - i. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha.
 - ii. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan.
 - iii. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang lain yang dilimpahkan.
3. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** dengan 1 (satu) Kegiatan yaitu
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - i. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan.
4. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa,** dengan satu kegiatan yaitu:
- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari :
 - i. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
 - ii. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - iii. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penggunaan Aset Desa
 - iv. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - v. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - vi. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - vii. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et Cap aian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATE N/KOTA		Presentase Penunjang Urusan Pemerintaha n daerah Kabupaten/Kota	100%	2.150.165.696	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATE N/KOTA		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintaha n daerah Kabupaten yang terlaksana	100%	2.150.165.696	
A	Perencanaan, Panganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	4.550.000	Perencanaan, Panganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	4.550.000	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pagedonga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Doku men	2.275.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pagedonga	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	8 Dokumen	2.275.000	
02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pagedonga	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 doku men	2.275.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pagedong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	14 dokumen	2.275.000	

								Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.838.790.496	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.838.790.496	
01	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Kec. Pagedonga	Jumlah Orang yg Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	1.813.160.496	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Kec. Pagedong	Jumlah Orang yg Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	1.813.160.496	
02	Pelaksanaan Pen atausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Pagedonga	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	22.380.000	Pelaksanaan Pen atausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Pagedong	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	22.380.000	
03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kec. Pagedonga	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	12 dokumen	3.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Kec. Pagedong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 dokumen	3.250.000	
C	Administrasi			100%		Administrasi			100%		

	Umum Perangkat Daerah				101.288.400	Umum Perangkat Daerah				101.288.400	
01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pagedonga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	12.918.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pagedong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	12.918.400	
02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Pagedonga	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	8 paket	88.370.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Pagedong	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	8 paket	88.370.000	
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	7.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	7.500.000	
	Pengadaan Mebelair	Kec. Pagedong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Pengadaan Mebelair		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit PC	7.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit Printer	7.500.000	
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah			100%	165.231.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah			100%	165.231.600	
01	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan	Kec. Pagedong	Jumlah Laporan Penyediaan Listrik yang disediakan	12 laporan	15,000,000	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan	Kec. Pagedong	Jumlah Laporan Penyediaan Listrik yang	12 laporan	15,000,000	

	Listrik					Listrik		disediakan			
02	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Kec. Pagedong	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	150.231.600	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Kec. Pagedong	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	150.231.600	
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	32.805.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	32.805.200	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Pagedong	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajaknya	8 unit	13.047.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Pagedong	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajaknya	8 unit	13.047.300	
02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Pagedong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	12.112.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Pagedong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	12.112.800	
03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Kec. Pagedong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20 unit	7.645.100	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Kec. Pagedong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/	20 unit	7.645.100	

	Bangunan Lainnya					Bangunan Lainnya		direhabilitasi			
04	Pemeliharaan /R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pagedonga	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/ direhabilitasi	-	-	Pemeliharaan /R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pagedong	Jumlah Saranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantoratau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	-	
II	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	50.100.000	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	50.100.000	
A	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			100%		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			100%		
01	Koordinasi/S inergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Pagedonga	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	9 Dokumen		Koordinasi/S inergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Pagedong	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	9 Dokumen		

								Umum			
B	Pelaksanaan Urusan Pemerintah anyang Dilimpahkan kepada Camat			100%	50.100.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintah anyang Dilimpahkan kepada Camat			100%	50.100.000	
01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan perizinan non usaha	Kec. Pagedonga	Jumlah Dokumen Non Perijinan Usahayang dilaksanakan	12 laporan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan perizinan non usaha	Kec. Pagedong	Jumlah Dokumen Non Perijinan Usaha yang dilaksanakan	12 laporan		
02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non-perizinan	Kec. Pagedonga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perijinan pada urusan Pemerintahan	3500 dokumen	3.600.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non-perizinan	Kec. Pagedong	Jumlah Laporan Pelaksanaan NonPerijinan pada urusan Pemerintahan	3500 dokumen	3.600.000	
03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkann	Kec. Pagedonga	Jumlah SPPT yang disalurkan (JumlahLaporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan)	10 laporan/ 32600 SPPT	46.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkann	Kec. Pagedong	Jumlah SPPT yang disalurkan (Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan)	10 laporan/ 32600 SPPT	46.500.000	
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM		Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	13.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH ANUMUM		Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	13.500.000	
A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan			100%	13.500.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan			100%	13.500.000	

	Kepala Daerah					Kepala Daerah					
01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Pagedonga	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 dokumen	13.500.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Pagedonga	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 dokumen	13.500.000	
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	25.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	25.000.000	
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100%	25.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100%	25.000.000	
01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desadan Peraturan Kepala Desa	Kec. Pagedonga	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9 dokumen		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desadan Peraturan Kepala Desa	Kec. Pagedonga	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9 dokumen		
02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pagedonga	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 dokumen		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pagedonga	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi	9 dokumen		

								Tata Pemerintahan Desa			
03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Pagedonga	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 dokumen		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Pagedonga	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 dokumen		
04	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Pagedonga	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	25.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Pagedonga	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	25.000.000	
05	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Pagedonga	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9 dokumen		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Pagedonga	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9 dokumen		
06	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pagedonga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 dokumen		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pagedonga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 dokumen		

07	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Pagedongan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	9 dokumen		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Pagedongan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	9 dokumen		
08	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Pagedongan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 laporan		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Pagedongan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 laporan		
					2.238.765.696					2.238.765.696	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu: Memprioritaskan Kegiatan yang belum terlaksana ditahun 2023

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD.Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

2.5. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan.Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

Tabel 2.5**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Pagedongan**

NO	Urusan	Permasalahan	Usulan	Alamat	Desa	Volume	Pagu	SKPD Tujuan Awal
1	Peningkatan Jalan untuk menunjang akses Pendidikan	Jalan utama untuk menuju lokasi pendidikan yang rusak parah	Rehab jalan aspal Dusun 4 Kembaran	Desa Kebutuhduwur	Desa Kebutuhduwur	2. 331 m ²	276,000,000	BPPKAD (PIK)
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan antar Desa Dukuh Pamurian yang menghubungkan ke Desa Gunungjati sudah rusak dan tidak layak	Pengaspalan Jalan Dukuh Pamurian RT 03. RW 01 - Desa Pagedongan	Dukuh Pamurian RT 3. RW 1 Desa Pagedongan	Dukuh Pamurian RT 3. RW 1 Desa Pagedongan	800 x 2,5 m	123,000,000	BPPKAD (PIK)
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Drainase Jalan Raya Pamurian-Ponjen dilingkungan kantor Kecamatan Pagedongan tidak ada	Pembangunan Drainase Jalan Raya Pagedongan Dukuh Ponjen - Pamurian	Dukuh Ponjen RT 4. RW 1 Desa Pagedongan	Dukuh Ponjen RT 4. RW 1 Desa Pagedongan	500 m	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Talud Jalan Kabupaten Ruas Dukuh Miriamba sering terjadi longsor	Pembangunan Talud Jalan Dukuh Miriamba Jalan Raya Watubelah - Desa Pesangkalan	Dukuh Watubelah RT 3. RW 5 Desa Pagedongan	Dukuh Watubelah RT 3. RW 5 Desa Pagedongan	100 x 4	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Raya Pagedongan Kebutuh masih terlalu sempit	Rekonstruksi Ruas Jalan Kabupaten (Peningkatan Jalan, Pelebaran Jalan)	Dukuh Jagangsari Desa Pagedongan	Dukuh Jagangsari Desa Pagedongan	800 x 2 m	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan sudah rusak ,belum adanya saluran air yang memadai dan tanah yang mudah longsor	Peningkatan Jalan Gunungjati - Pagedongan	Kadus 1 (Depok)	Kadus 1 (Depok)	1.000 M	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jembatan yang sudah ada Ambles/Rusak	Jembatan Jalan Raya Gunungjati	Kadus 3 (Sitawun)	Kadus 3 (Sitawun)	3 X 6 M	225,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum adanya jembatan penghubung antara 2 Desa	Jembatan Kalidondong-Kebutuh Duwur	Kadus 4 (Bilangan)	Kadus 4 (Bilangan)	8 X 10 M	450,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jembatan yang sudah ada masih terlalu sempit sehingga perlu pelebaran jembatan	Jembatan Jalan Raya Gunungjati	Kadus 4 (Kamal)	Kadus 4 (Kamal)	8 X 15 M	610,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jembatan yang sudah ada pondasiny mulai terkikis air dan ambles	Jembatan Jalan Raya Gunungjati	Kadus 2 (Gunungjati Tengah)	Kadus 2 (Gunungjati Tengah)	3 X 6 M	225,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

11	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sering terjadi Longsong di jalan Raya Pagedongan - Twelagiri karena tebing masih tanah dan diatas tebing ada Sekolah Dasar Negeri 1 Twelagiri yang memiliki +/- 120 siswa	Pembangunan Talud Jalan Dusun Sayangan pengaman jalan Raya Pagedongan - Twelagiri	RT 01 RW 03 Dusun Sayangan Desa Twelagiri	RT 01 RW 03 Dusun Sayangan Desa Twelagiri	200 x 4 m	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan penghubung antar Kecamatan masih terlalu sempit untuk dilalui kendaraan roda 4, sehingga menghambat laju perjalanan baik dibidang ekonomi maupun kesehatan.	Rekonstruksi Ruas Jalan Kabupaten (Peningkatan Jalan, Pelebaran Jalan) - jalan penghubung antar Kecamatan	Dusun Sayangan - Dusun Wanatawang - Dusun Sikele Desa Twelagiri	Dusun Sayangan - Dusun Wanatawang - Dusun Sikele Desa Twelagiri	4000 x 2 m	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pondasi Jembatan sudah menggantung karena terkikis sungai yang meluap, Posisi jembatan tidak sejajar dengan jalan sehingga sering terjadi kecelakaan.	Rehab Jembatan Jalan Propinsi di jalan Raya Pagedongan - Twelagiri	RT 03 RW 01 Dusun Gunungalang Desa Twelagiri	RT 03 RW 01 Dusun Gunungalang Desa Twelagiri	1 Ls	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Selain posisi Jembatan yang sudah mengkhawatirkan talud- talud pengaman Jembatan juga sudah hanyut terbawa banjir	Pembangunan Talud Pengaman Jalan dan Jembatan	RT 03 RW 01 Dusun Gunungalang Desa Twelagiri	RT 03 RW 01 Dusun Gunungalang Desa Twelagiri	40 x 1 x 6 m	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Susah dan jauhnya fasilitas umum seperti kesehatan dan Pendidikan di Kadus Sikele Twelagiri dan Dukuh Buyung - pagedongan.	Dusun Pagutan RT 1. RW 4 Desa Twelagiri	Dusun Pagutan RT 1. RW 4 Desa Twelagiri	Dusun Pagutan RT 1. RW 4 Desa Twelagiri	2000 x 2 m	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jembatan Jalan Kabupaten yang sudah mulai rusak dan membahayakan pengguna	Dukuh Pamurian RT 3. RW 1 Desa Pagedongan	Dukuh Pamurian RT 3. RW 1 Desa Pagedongan	Dukuh Pamurian RT 3. RW 1 Desa Pagedongan	4 x 5 m	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	Dukungan Bantuan Infrastruktur untuk peningkatan keterlibatan Masyarakat	Jalan rusak sulit dilalui	Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Jalan Desa Kebutuhduwur-Desa Lebakwangi)	Desa Kebutuhduwur	Desa Kebutuhduwur	3750 m ²	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

18	Dukungan Bantuan Infrastruktur untuk peningkatan keterlibatan Masyarakat	Jalan rusak sulit dilalui	Pembangunan Jalan Rabat Beton Ruas Jalan Dusun Kutasari Ke Dusun Wanarasa	Desa Kebutuhduwur	Desa Kebutuhduwur	1.250 m ²	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	Dukungan Bantuan Infrastruktur untuk peningkatan keterlibatan Masyarakat	Akses jalan ke tempat pertanian sulit	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Kebutuhduwur	Desa Kebutuhduwur	2.500 m ²	500,000,000	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
20	Dukungan Bantuan Infrastruktur untuk peningkatan keterlibatan Masyarakat	Misim Kemarau akan kesulitan air bersih	Pembuatan Sumur Bor Air Dalam	Desa Kebutuhduwur	Desa Kebutuhduwur	1 Unit	300,000,000	DPKPLH
21	Penyediaan Air Bersih Untuk Masyarakat	Kekurangan kebutuhan air bersih bagi kebutuhan masyarakat	Pembangunan Sumur Dalam (BOR)	Desa Kebutuhjurang	Desa Kebutuhjurang	2 Unit	550,000,000	DPKPLH
22	Perumahan dan Permukiman	masih ada rumah yang belum layak huni	Pemugaran RTLH	Desa Kebutuhjurang	Kebutuhjurang	30 Unit	600,000,000	DPKPLH

23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kondisi jalan rusak, merupakan jalan penghubung antar desa	Pembangunan Ruas Jalan Kebutuhjurang-Kebutuhduwur-Pesangkalan	Dusun Maron, Kadus 1 Desa Kebutuhjurang	Kebutuhjurang	2.000 x 2,7M	740,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kondisi jalan rusak, merupakan jalan penghubung antar desa	Pembangunan Ruas Jalan Kebutuhjurang-Lebakwangi	Dusun Belokan, Kadus 3 Desa Kebutuhjurang	Desa Kebutuhjurang	800m x 2,7 m	375,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
25	Perkebunan	masih terdapat lahan kosong yang harus segera di reboisasi guna penambahan pendapatan dan penanggulangan bencana	Bantuan kelompok Tani/bibit tanaman	Kelompok Tani Sadar Usaha Desa Kebutuhjurang	Kelompok Tani Sadar Usaha Desa Kebutuhjurang	300 hektar	800,000,000	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
26	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Ruas jalan Kabupaten yang ada di Pesangkalan Masih sempit	pelebaran jalan kabupaten ruas jalan pesangkalan	Dusun Banjaran-Dusun Jatisari Desa Pesangkalan	Dusun Banjaran-Dusun Jatisari Desa Pesangkalan	1500 x 4 m	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
27	Komunikasi dan Informatika	belum ada tower/sinyal seluler	Pengadaan Jaringan Internet/Tower Sinyal Seluler	Desa Pesangkalan	Desa Pesangkalan	2 Titik	1,500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
28	Pariwisata	sarana prasarana jalan akses ke wisata masih belum memadai	Pembangunan Jalan Lokasi Wisata Tegal Raja Resort	Desa Pesangkalan	Desa Pesangkalan	500x3x0,20 M	500,000,000	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub

								Bidang Pariwisata Desa: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pariwisata desa)
29	Sarana prasarana olah raga	Sarana Prasarana olah raga Belum Memenuhi Standar	Pembuatan sarana olahraga mini soccer	Desa Pesangkalan	Desa Pesangkalan	30 x 60 m	800,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
30	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Desa Rawan Bencana	Peralatan Pendukung Penangana Kebencanaan	Desa Pesangkalan	Desa Pesangkalan	Ls	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31	Pertanian	Jalan aspal rusak berat	Pembangunan Rabat Beton JUT Dukuh Kalipetung	Duren	Duren	1.200x3x0,15m	900,000,000	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan

32	Pertanian	Jalan tanah dan sempit	Pembangunan Rabat Beton JUT Dukuh Beji	Duren	Duren	1.400x3x0,15m	1,200,000,000	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
33	Pertanian	Badan jalan longsor	Pembangunan Talud JUT Dusun Kemputan	Duren	Duren	350x3m	600,000,000	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
34	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Jalan rabat rusak berat	Pembangunan Jalan Rabat Beton Kadus Jolang	Duren	Duren	1.800x2,5x0,15m	1,400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
35	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Jembatan belum ada	Pembangunan Jembatan Duren-Lebakwangi	Duren	Duren	14x3m	800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
36	Pekerjaan Umum	Akses penghubung 2 Dusun sudah sangat rusak	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Aspal Dusun Silegi RT 01 RW 03 - Dusun Limbangan RT 01 RW 05	Lebakwangi Dusun Silegi RT 01 RW 03	Lebakwangi Dusun Silegi RT 01 RW 03	P 350 M, L 2.5 M, T 0.04 M	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
37	Pekerjaan Umum	Akses penghubung antar Desa	Pelebaran Jalan Kabupaten Dari Desa Gunungjati-Lebakwangi-Majalengka	Ruas Jalan Kabupaten	Ruas Jalan Kabupaten	P 3000 M, L 3 M	30,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
38	Pekerjaan Umum	Akses penghubung antar Desa Jalan	Pelebaran Jalan Desa Lebakwangi -	Jalan Desa Lebakwangi -	Jalan Desa Lebakwangi -	P 2000 M, L 3 M	10,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum

		sudah Rusak dan Kondisi Jalan belum Luas	Desa Duren	Desa Duren	Desa Duren			
39	Pendidikan	Bangunan sudah sedikit amblas, atap asbes sudah tidak layak.	Pembangunan Gedung PAUD Adinda	Dusun Siwaru	Dusun Siwaru	1 Unit	200,000,000	Dindikpora
40	Pekerjaan Umum	Air sungai menyebabkan erosi, 4 RT yang terdampak Erosi	Dam pengendali sungai	Dusun Sudimara	Dusun Sudimara	P 700 M	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
41	Pekerjaan Umum	Akses penghubung antar RT dan RW	Jembatan Penghubung antar Dusun	Desa Lebakwangi	Desa Lebakwangi	1 Paket	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
42	Kesehatan	Masih banyak masyarakat menggunakan sumber air tidak terlindungi	Sarana Air Bersih	Desa Lebakwangi	Desa Lebakwangi	1 Paket	350,000,000	DPKPLH
43	Lingkungan Hidup	Kondisi air bersih tidak merata	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih	Gentansari	Gentansari	8 KM	1,000,000,000	DPKPLH
44	Kawasan Permukiman	Masih banyak warga yang belum memiliki jamban sehat	Jambanisasi	Gentansari	Gentansari	20 Unit	50,000,000	Dinas Kesehatan
45	Kawasan Permukiman	Masih banyak warga yang rumahnya tidak	Pemugaran RTLH	Gentansari	Gentansari	20 Unit	300,000,000	DPKPLH

		layak huni						
46	Pekerjaan Umum	Sering terjadi genangan di jalan saat hujan	Pembangunan Drainase Jalan Raya Gentansari-Masaran	Gentansari	Gentansari	500 meter	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
47	Pekerjaan Umum	Jides sudah rusak	Pembangunan Jides	Gentansari	Gentansari	500 meter	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

(7) Tujuh tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 :

1. Meningkatnya Kondusivitas wilayah, sasarannya sebagai berikut:
 - a. Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama dengan program prioritasnya :
 - Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
 - b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan program prioritasnya :
 - Penanggulangan bencana
 - Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi, sasarannya sebagai berikut:
 - a. .
3. Meningkatnya kinerja perekonomian daerah, sasarannya sebagai berikut :
4. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, sasarannya sebagai berikut :
 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan

tutupan lahan

5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan program prioritasnya :
 - Program Pengelolaan Keuangan daerah
 - Program Pengelolaan Pendapatan daerah
 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Program Administrasi Pemerintahan Desa
6. Meningkatnya kualitas layanan publik dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik , dengan program prioritasnya
 - Program Penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota
 - Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public
 - Program informasi dan komunikasi publik
7. Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas , dengan sasaran
Sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - b. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan
 - c. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah
 - d. Meningkatnya cakupan rumah layak huni
 - e. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 memperhatikan RPJPD Tahun 2025-2025 dengan visi Bupati

Banjarnegara sebagai berikut :

“ Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian “

Misi yang akan dilaksanakan merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Misi Kepala Daerah adalah :

1. Mewujudkan Masyarakat Madani yang Agamis, dengan Menciptakan Masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan, nilai nilai luhur agama dan budaya,
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai;
3. **Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab;**
4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar

Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pagedongan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari empat misi tersebut adalah **Misi Ketiga** yaitu :

1. **Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab;**

Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, memperkuat komitmen untuk menciptakan good governance. Fokus peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangkan melalui fokus kedua, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.

Tata kelola keuangan merupakan salah satu aspek dalam good governance, diharapkan melalui misi ini pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien, dan lebih mandiri dalam segi pembiayaan pembangunan.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Perumusan tujuan strategis memungkinkan Kecamatan Pagedongan untuk mengukur sejauh mana kinerja PD dalam membantu tercapainya visi misi Kepala Daerah. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya efektivitas dan transparansi pelayanan publik

Kedua tujuan strategis tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat, Tujuan akhir dari Kecamatan Pagedongan adalah menerapkan prinsip *good governance* di lingkungan Kecamatan Pagedongan. Untuk mewujudkan

tujuan tersebut maka harus ditopang dengan Sumber Daya Manusia yang trampil, pintar, profesional, berprestasi tinggi adalah dambaan bagi setiap lembaga/organisasi baik di sektor pemerintah maupun di dunia swasta, serta adanya dukungan dari sarana prasarana pada Kecamatan Pagedongan yang memadai.

TUJUAN.

Tujuan Kecamatan Pagedongan dalam 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) Tahun ke depan adalah antara lain:

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik

SASARAN

Sasaran yang akan dicapai Kecamatan Pagedongan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari jadwal waktu yang sudah ditentukan. Dalam sasaran tersebut meliputi uraian sasaran dan indikator sasaran, uraian sasaran dari Rencana Strategis Kecamatan Pagedongan adalah:

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan
2. Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Layanan Publik Untuk Urusan Kewilayahan

1.3. Program dan Kegiatan

(Sajikan matriks yang berasal dari SIPD)

7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.838.790.496						1.956.000.000
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gajidan Tunjangan ASN	Kecamatan Page dongan	100%	15 orang		1.813.160.496		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		15 orang	1.900.000.000	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Page dongan	100%	12 Dokumen		22.380.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	50.000.000	
7	1	1	2.02	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Kecamatan Page dongan	100%	12 dokumen		3.250.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 dokumen	6.000.000	
7	1	1	2.06		Administrasi umum Perangkat Daerah								101.288.400					107.500.000	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Page dongan	100%	1 paket		12.918.400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 paket	17.500.000	

7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pageongan	100%	8 paket		88.370.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 paket	90.000.000
	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								7.500.000				50.000.000
7	1	1	2.07		Pengadaan Mebelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Paket Mebelair	Kecamatan Pageongan	100%	10 unit Meja Rapat dan 2 unit lemari arsip		0			1 paket (25 unit kursi)	25.000.000
					Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kecamatan Pageongan	100%	2 Unit PC dan 2 Unit AC		7.500.000			2 paket Laptop	25.000.000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								165.231.600				177.500.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pageongan	100%	12 laporan		15.000.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 laporan	17.500.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pageongan	100%	12 laporan		150.231.600		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 laporan	160.000.000
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								32.805.200				75.000.000

7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemel, Biaya Pemel, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Page dongan	100%	8 unit		13.047.300		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 unit	25.000.000
7	1	1	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Page dongan	100%	2 unit		12.112.800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	30.000.000
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Page dongan	100%	20 unit		7.645.100		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20 unit	20.000.000
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana		Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Page dongan	100%			0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													50.100.000				
7	0	02	2'03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								0				22.500.00

7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Prosentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kabupaten Banjarnegara	100%	1 dokumen		0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		9 dokumen		22.500.000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								50.100.000							75.000.000
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perijinan Non Usaha	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Pageongan		12 laporan		0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 laporan		7.500.000	
7	1	02	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kecamatan Pageongan		3500 dokumen		3.600.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3500 dokumen		7.500.000	

7	1	02	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan)	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Tersalurkannya SPPT PBB ke wajib Pajak)	Kecamatan Pagedongan		10 laporan/ 32600 SPPT		46.500.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 laporan/ 32600 SPPT	60.000.000
7	1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							13.500.000				17.500.000	
7	1	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							13.500.000				17.500.000	
7	1	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Pagedongan		4 dokumen		13.500.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 dokumen	17.500.000
7	1	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							25.000.000				73.000.000	
7	1	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							25.000.000				73.000.000	
7	1	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase pembinaandan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Pagedongan		9 dokumen		0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 dokumen	6.000.000
7	1	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pagedongan		9 dokumen		0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 dokumen	7.500.000

7	1	06	2.01	03	Fasilitas Pengelolaan Desa dan Pendayagunaan Aset desa	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Pagedongan		9 dokumen		0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 dokumen	12.500.000
7	1	06	2.01	06	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Prosentase hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Pagedongan		1 dokumen		25.000.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	8 dokumen	240.000.000
7	1	06	2.01	09	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Pagedongan		9 dokumen		0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 dokumen	17.500.000
7	1	06	2.01	11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pagedongan		9 dokumen		0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	9 dokumen	6.000.000
					Fasilitas Penyusunan	Prosentase hasil	Jumlah Dokumen	Terlaksananya Fasilitas	Kecamatan Pagedongan		9 dokumen		0		Dana Transfer	9 dokumen	6.000.000

7	1	06	2.01	16	Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	n						Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	06	2.01	17	Fasilitasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Pagedongan		9 laporan		0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 laporan		17.500.000
											TOTAL	2.238.765.696						2.543.500.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di

Sebagai berikut

(mengacu pada bab 5 RKPD)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran,
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebelair
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
 - Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah terdiri dari 4(empat) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - Sub kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
- b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait dengan Nonperizinan
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

- 3. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum** terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
- 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** terdiri dari satu kegiatan, yaitu ; Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu
- Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2022-2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2022-2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 25 Agustus 2023

KECAMATAN PAGEDONGAN,



ERWAN ADI PRIYANTO, S.STP
NIP. 19780226 199703 1 003